



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kepercayaan Publik Bisa Tergerus: Hak Prerogatif  
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 3

## Kepercayaan Publik Bisa Tergerus

■ Mas Alamil Huda,  
Halimatus Sa'diyah

Jokowi tetap melanjutkan proses pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

JAKARTA — Dipilihnya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi, sebelum pemilihan Kapolri, Jokowi telah memilih Jaksa Agung M Prasetyo yang berasal dari partai politik dan sejumlah menteri yang dinilai tipuan pihak-pihak tertentu.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Mardil mengatakan, nama Budi memang disebut-sebut sebagai salah satu dari beberapa perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak dalam jumlah yang tidak wajar. Jika Jokowi ingin semus pembantunya bersih, seharusnya dia memastikan dugaan tersebut dengan melibatkan KPK dan PPATK.

"Dugaan adanya rekam gendut yang dimiliki Budi Gunawan akan mendegradiasi kepercayaan publik kepada polisi dan juga Jokowi sendiri," kata Oce saat dihubungi *Republika*, Senin (12/1).

Menurutnya, pemilihan calon Ka-

polri pengganti Jenderal Sutarmi memang seharusnya dilakukan dengan melibatkan PPATK dan KPK. Dua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menelusuri rekam jejak seorang pejabat negara. Pelibatan KPK dan PPATK sebagai masukan untuk Jokowi untuk memastikan integritas calonnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan akan tetap melanjutkan proses pengangkatan Budi sebagai Kapolri. "Kekarang kita tunggu proses yang ada di DPR," ucapnya usai meninjau PT Pindad di Bandung, Senin (12/1).

Ketika ditanya soal alasan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK, Jokowi enggan menjawab. "Nanti kalau saya jawab lenyinya ke tempat yang lain," ujar mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Politikus senior PDIP Purnawangsa yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo, mengil wajar pilihan calon kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo. Selama calon tersebut diketahui memiliki rekam jejak dan kualitas yang bagus, tak ada alasan untuk menolak pilihan presiden.

"Pengangkatan kapolri, KSAU, KSAF, adalah hak prerogatif presiden. Yang penting bukti-bukti yang presiden punya *clean and clear*. Soal memilih, pasti presiden akan memilih yang dia kenal, yang dia tahu," kata Tjahjo, di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (12/1).

Menurut Tjahjo, dilibatkan atau tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga merupakan hak prerogatif presiden.

Sepanjang calon kapolri dinilai berkualitas dan bersih, menurutnya, tidak ada yang salah dari calon yang diajukan presiden.

Komjen Budi Gunawan, dia melanjutkan, menurut Presiden Jokowi, memiliki jejak rekam yang bagus. Bahkan, hasil investigasi internal kepolisian juga menunjukkan yang bersangkutan tidak bermasalah.

"Soal Pak BG, dia *track record*nya bagus, bisa dicek. Soal ada tuduhan, mari kita buktikan. Hasil telah semua *clear*," ujar Tjahjo.

Anggota Komisi III Martin Huta-barat mengatakan cara Presiden menyampaikan pergantian ini kurang lazim. "Tidak seperti etika ketimuran kita," ujar Martin. Dia menuturkan, seharusnya Presiden Jokowi berbicara terlebih dahulu dengan Kapolri saat ini. "Ini kesannya Pak Sutarmi *ngak tahu*-menahu kalau dia mau digantikan," katanya.

Terkait hal di atas, Martin menjelat-

### Hak Prerogatif

Memilih menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi, kebijakan Presiden Jokowi memilih sejumlah pembantunya dinilai kontroversial. Ini terkait dengan latar belakang calon yang dipilih atau proses pemilihannya yang tak melibatkan KPK dan PPATK. Berikut sejumlah pejabat yang dipilih Jokowi dan memunculkan kontroversi.



#### ■ Pemilihan Kapolri Budi Gunawan

- Tak melibatkan KPK dan PPATK, padahal pada era Presiden SBY, KPK diminta untuk menguji kebenaran harta kekayaan calon Kapolri
- Budi merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004
- Publik menilai, Budi merupakan titipan Megawati Soekarnoputri
- Budi pernah gencar diberitakan media massa terkait rekening gendut Rp 54 miliar pada 2010
- Budi pernah bertemu dengan komisioner KPK dan politikus PDIP di sebuah rumah makan pada masa pilpres 2014



#### ■ Pemilihan Jaksa Agung M. Prasetyo

- Tak melibatkan KPK dan PPATK
- Prasetyo selama menjadi jaksa dinilai minim prestasi
- Prasetyo merupakan politikus Partai Nasdem
- Nama Prasetyo diajukan oleh pengusaha sekaligus pendiri Partai Nasdem Surya Paloh



#### ■ Pemilihan Menteri BUMN Rini Soemarno

- Rini merupakan teman dekat Megawati Soekarnoputri
- Rini pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi BLBI



#### ■ Pemilihan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

- Ryamizard disebut sejumlah aktivis HAM bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Aceh 2003-2004
- Ia juga dikaitkan secara tidak langsung dengan pelanggaran HAM pembunuhan Doriheys Hiyo Eluay di Papua

Sumber: Pusat Data Republika

apa yang dilakukan Jokowi telah melenceng dari keinginan masyarakat. Terutama dalam proses penunjukan ini tanpa melibatkan institusi KPK dan PPATK. Apalagi, sebelumnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KPK selalu dilibatkan untuk membuktikan la-

■ 09 ed: muhammad halil